

**DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA  
TENGAH PERIODE 2019-2023)**

**Salsabilla Mulia<sup>1</sup>; Jacobus Widiatmoko<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang<sup>1,2</sup>

Email : salsabillamulia7006@unisbank.ac.id<sup>1</sup>; jwidiatmoko@edy.unisbank.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Riset ini bertujuan mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, dengan mempertimbangkan peran variabel kontrol Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) dan Rasio Kemandirian (RK). Fokus riset ini adalah merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi guna memperkuat kemandirian fiskal berkelanjutan. Metodologi kuantitatif berlandaskan pendekatan kuantitatif, yang memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar dari riset ini. Sebanyak 35 kabupaten dan kota yang menjadi subjek penelitian ini dipilih dengan mengaplikasikan pendekatan purposive sampling. Model regresi linier berganda, dengan bantuan SPSS untuk menganalisis data. Riset mengungkap bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berkontribusi positif. Belanja Modal berhubungan negatif dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Rasio Kemandirian (RK) secara statistik berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi yang sama, sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pengelolaan pendapatan dan belanja yang efektif, transparan, serta berbasis prioritas pembangunan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Modal

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Local Governments in Central Java Province for the 2019-2023 period, by considering the role of control variables Local Government Size (UPD) and Independence Ratio (RK). The primary objective of this analysis is to formulate strategies for optimizing local revenue and integrated financial management to strengthen sustainable fiscal independence. The methodology employed in this research is grounded in a quantitative approach, utilizing secondary data obtained from local government financial reports as the foundational basis for the study. A total of 35 districts and cities were sampled using purposive sampling technique. Multiple linear regression models, with the help of SPSS, were used to analyze the data. Research reveals that Local Own Revenue (PAD) and Balance Funds contribute positively to the financial performance of regional governments. Conversely, Capital Expenditure is negatively associated with the financial performance of local governments. Furthermore, the Independence Ratio (IR) has a statistically significant negative impact at the same level of significance, while the Size of Local Government (SLG) does not demonstrate a significant effect. These*

*findings underscore the urgency of effective, transparent, and priority-based revenue and expenditure management to improve regional financial performance.*

*Keywords : Financial Performance of Local Governments; Local-Own Source Revenue; Balance Fund; Capital Expenditure*

## PENDAHULUAN

Reformasi kebijakan bertujuan meningkatkan desentralisasi pemerintahan dengan memindahkan wewenang pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah, sesuai UU No. 23/2014 yang mendefinisikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah (Mubarok et al., 2022). PP No. 12/2019 mempertegas cakupan keuangan daerah, termasuk aset dan kewajiban bernilai moneter. Kinerja pengelolaan keuangan ini menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan, dengan penerapan prinsip *good corporate governance* sebagai faktor penentu utamanya (Malau et al., 2019). Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk layanan publik dinilai melalui variabel seperti PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal (Digdowiseiso et al., 2022).

Laporan APBD Provinsi Jawa Tengah 2023 mencatat realisasi PAD mencapai 99,95%, realisasi transfer dari pemerintah pusat sebesar 101,32%, dan realisasi belanja modal 95,58% (Keuangan, 2023). Meski angka ini tergolong tinggi, efektivitas kinerja keuangan masih belum maksimal. Teori *stewardship* menyoroti tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik yang wajib transparan dan akuntabel (Digdowiseiso et al., 2022). Beberapa riset mengindikasikan bahwa PAD berhubungan positif dengan kinerja keuangan (Ratnawati et al., 2023), meski ada pula riset yang menemukan pengaruh negatif (Ekaningtias & Thalib, 2019). Di sisi lain, Dana Perimbangan cenderung memberikan pengaruh positif (Saring et al., 2022) walau sebagian riset menyatakan adanya korelasi negatif (Ratnawati et al., 2023). Sementara itu, Belanja Modal dinilai berpotensi meningkatkan kinerja keuangan (Mubarok et al., 2022), namun beberapa peneliti menyatakan tidak ada kaitan yang signifikan (Ardelia et al., 2022).

Riset ini memanfaatkan dua variabel kontrol, yaitu Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) dan Rasio Kemandirian (RK). UPD menilai kapabilitas fiskal dan administratif melalui parameter aset, anggaran, atau jumlah penduduk, di mana skala yang lebih besar memperkuat potensi sumber daya dalam mendukung kinerja keuangan (Mubarok et al., 2022). Sementara itu, RK menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas operasional secara mandiri melalui perbandingan PAD dengan total

pendapatan, yang berpengaruh pada fleksibilitas kebijakan fiskal. Kedua variabel ini berperan dalam mengurangi bias analitis dengan mengontrol faktor eksternal seperti ketersediaan sumber daya dan tingkat ketergantungan fiskal (Ekaningtias & Thalib, 2019). Merespons inkonsistensi hasil riset terdahulu, riset ini mengevaluasi pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah selama periode 2019–2023.

## TINJUAN PUSTAKA

### **Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* menyoroti peran pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik, dengan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan mandat pengelolaan keuangan berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Digdowiseiso et al., 2022). Mandat ini berlandaskan kepercayaan bahwa pemerintah mampu mewujudkan aspirasi publik, menyediakan layanan responsif, dan mengelola aset secara efisien (Nurul, 2018). Dalam konteks daerah, konsep ini memperkuat komitmen pemerintah untuk berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan individu atau kelompok (Puspita & Halimatusyadiah, 2021). Efektivitas kinerja finansial suatu daerah sangat terkait erat dengan kapabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan peran sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab, khususnya dalam upaya memaksimalkan perolehan pendapatan daerah serta mengelola alokasi anggaran belanja secara efisien dan efektif. (Tumija & Sinta, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kapasitas pemerintah dalam memaksimalkan potensi ekonomi lokal secara mandiri (Widiawaty, 2019). Peningkatan PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah sebagai *steward* yang mampu memberdayakan sumber daya daerah. Sementara itu, Dana Perimbangan bersumber dari transfer pusat terkait erat dengan teori ini karena pengelolaannya yang efektif dapat mengurangi ketergantungan fiskal (Goeminne & George, 2019). Belanja Modal adalah manifestasi komitmen pemerintah dalam rekayasa infrastruktur publik berkelanjutan, yang berorientasi pada peningkatan social return on investment. Di sisi lain, alokasi sumber daya ini bertujuan untuk optimalisasi fondasi sosio-ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas layanan esensial selaras dengan prinsip *stewardship* (Mardiasmo, 2018).

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan institusional yang kompleks dalam pengelolaan, pengalokasian, serta optimalisasi sumber daya finansial secara terarah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan wilayah yang terintegrasi dan berkesinambungan. (Ratnawati & Putri, 2023). Evaluasi aspek ini dilakukan melalui analisis tingkat keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendapatan, belanja, serta kapasitas pengaturan aset daerah (Dumadi et al., 2022). Pemerintah daerah dengan tata kelola keuangan yang kuat umumnya mampu membangun kemandirian fiskal berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu faktor kunci penentu kinerja ini adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif (Malau et al., 2019).

Penilaian kinerja keuangan memiliki sejumlah manfaat strategis. Pertama, berfungsi sebagai alat evaluasi tingkat keberhasilan implementasi efektivitas dan efisiensi penganggaran. Kedua, esensi dari tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab terletak pada penguatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang solid. Ketiga, menjadi mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran dengan regulasi yang berlaku. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah meliputi:

1. Skala kelembagaan pemerintah,
2. Tingkat ketergantungan pada transfer dana pusat,
3. Pola alokasi belanja daerah,
4. Volume kekayaan daerah,
5. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Nugraheni & Adi, 2020).

Di samping itu, faktor-faktor seperti dimensi geografis, tingkat kompleksitas dalam struktur birokrasi, serta hasil evaluasi opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian kinerja keuangan yang optimal pada tingkat pemerintahan daerah. Pengaruh dari variabel-variabel ini saling berinteraksi dan menciptakan dinamika yang kompleks dalam konteks pengelolaan keuangan publik. (Wijayanti & Suryandari, 2020).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD berpangkal dari pengoptimalan potensi ekonomi wilayah setempat dan menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian

fiskal (Ekaningtias & Thalib, 2019). Komponen PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, serta pendapatan legal lainnya yang diatur berdasarkan regulasi (Yuniarta & Putri, 2023). Peningkatan kontribusi PAD dinilai penting untuk meminimalkan ketergantungan pada alokasi dana pusat, sekaligus memperluas otonomi daerah dalam merencanakan dan menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pengelolaan PAD secara efektif berkontribusi langsung pada peningkatan capaian kinerja keuangan daerah. Beberapa parameter evaluasi kinerja PAD mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio efisiensi pengumpulan pendapatan, dan rasio efektivitas pengelolaan sumber daya (Isna, 2022). Temuan riset mengungkapkan bahwa PAD memainkan peran signifikan sebagai determinan utama dalam memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah, terutama dalam mengevaluasi kapasitas pemerintah menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal (Raihan Muhammad Al, 2022). Dalam konteks desentralisasi fiskal, PAD juga berperan sebagai indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuannya mendorong pembangunan berkelanjutan (Halim, 2023).

### **Dana Perimbangan**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menggarisbawahi betapa esensialnya dana perimbangan dalam konteks tata kelola keuangan negara, di mana dana ini tidak hanya diproyeksikan untuk mendorong percepatan otonomi daerah, melainkan juga untuk mengatasi problematik ketidakseimbangan fiskal yang mungkin muncul antara level pemerintahan pusat dan daerah. Dana ini terdiri dari tiga kategori: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH berasal dari pendapatan negara yang dikelola pemerintah pusat, termasuk bagi hasil pajak dan sumber daya alam. DAU bertujuan menjamin pemerataan kemampuan fiskal antardaerah, sementara DAK dialokasikan dengan prinsip selektif, yang mana pendanaannya diprioritaskan untuk mendukung program-program strategis nasional yang diimplementasikan secara otonom oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan dana perimbangan yang terstruktur mampu memberikan dampak nyata pada peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan layanan publik dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Keberhasilan pemanfaatan dana ini dapat dinilai melalui parameter seperti tingkat penyerapan

anggaran, dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan publik, serta perannya dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa pengelolaan dana perimbangan yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Goeminne & George, 2019).

### **Belanja Modal**

Belanja modal merujuk pada anggaran yang dialokasikan untuk mengakuisisi, mengembangkan, atau meningkatkan aset tetap guna mendukung operasional pemerintahan, sesuai UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010. Alokasi ini umumnya difokuskan pada investasi infrastruktur untuk menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan potensi pendapatan daerah (Haryanto et al., 2019). Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur fisik, penyediaan sarana-prasarana, dan pendanaan proyek strategis guna meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengelolaan belanja modal yang efisien mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Digdowiseiso et al., 2022). Namun, beberapa riset menemukan bahwa hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan daerah tidak signifikan, mengindikasikan bahwa dampaknya bergantung pada faktor eksternal seperti kebijakan pengawasan, kualitas perencanaan, atau kondisi lingkungan (Sedana et al., 2018).

### **Model Riset**

Berdasarkan Gambar 1 yang dilampirkan, model riset ini menunjukkan hubungan antara PAD (X1), Belanja Modal (X2), dan Dana Perimbangan (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) melalui hipotesis H1, H2, dan H3. Selain itu, terdapat variabel kontrol berupa Ukuran Pemerintah Daerah dan Rasio Kemandirian yang turut memengaruhi kinerja keuangan secara tidak langsung. Model ini diolah oleh penulis untuk menggambarkan pengaruh faktor-faktor fiskal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Signifikansi PAD terletak pada perannya sebagai fondasi kemandirian fiskal suatu entitas daerah. Optimalisasi PAD bukan hanya sekadar indikator kinerja keuangan

yang superior, melainkan juga mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Sebuah daerah yang mampu memaksimalkan PAD secara efektif menunjukkan kapasitas untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, yang pada gilirannya memperkuat otonomi dan kemandirian fiskalnya, yang sejalan dengan penekanan teori *stewardship* pada akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat (Digdowiseiso et al., 2022). Berbagai riset, seperti riset Maulina et al. (2021), Digdowiseiso et al. (2022), Padang et al. (2023), Ardelia et al. (2022), dan Ratnawati et al. (2023), mengonfirmasi bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap capaian kinerja keuangan daerah.

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Merujuk pada *stewardship theory*, Dana Perimbangan diasumsikan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena teori ini mengandaikan bahwa pengelola keuangan publik, seperti aparat pemerintah daerah, berperan sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat daripada kepentingan pribadi. (Goeminne & George, 2019). Dana Perimbangan berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan fiskal antar daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, dan memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Riset empiris dari Saring et al. (2022), Maulina et al. (2021), dan Padang et al. (2023) mengonfirmasi bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja fiskal pemerintah daerah. Namun, efektivitas dampaknya sangat ditentukan oleh kapasitas pengelolaan dan ketepatan alokasi dana tersebut.

H<sub>2</sub>: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja Modal memiliki dampak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah melalui dorongan pengembangan infrastruktur dan aset berkelanjutan yang meningkatkan efisiensi layanan publik serta pertumbuhan ekonomi lokal (Haryanto, 2019). Namun, efeknya tidak selalu linier, sebab manajemen yang tidak optimal—seperti alokasi anggaran tidak tepat atau inefisiensi proyek dapat berpotensi



menurunkan kinerja keuangan. Riset empiris oleh Mubarok et al. (2022), Digdowiseiso et al. (2022), dan Padang et al. (2023) menunjukkan hubungan positif antara belanja modal dan peningkatan kinerja fiskal. Meski demikian, dampak optimal hanya dapat dicapai melalui perencanaan menyeluruh dan mekanisme transparansi akuntabilitas.

H<sub>3</sub>: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **METODE RISET**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode riset dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, guna melakukan analisis terhadap 35 kabupaten dan kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah periode 2019–2023. Variabel yang dikaji meliputi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dependen (Y) serta PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebagai independen (X). Dua variabel kontrol Ukuran Pemerintah Daerah dan Rasio Kemandirian Fiskal diukur menggunakan indikator yang merujuk pada teori keuangan publik.

Analisis menggunakan regresi linier multivariat via SPSS, mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji-t dan uji-F untuk menguji hipotesis. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk menilai kontribusi variabel independen terhadap kinerja keuangan.

#### **Pengukuran Variabel**

##### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja dinilai berdasarkan rasio realisasi belanja terhadap pendapatan dalam persentase (Thalib & Ekaningtias, 2019). Sehingga KKPD dirumuskan sebagai berikut

$$KKPD = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

##### **Pendapatan Asli Daerah**

PAD dihitung dari pajak, retribusi, dan pendapatan aset daerah (Ardelia et al., 2022). Dengan demikian, rumus untuk menentukan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut



$$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah + Lain - Lain PAD Yang Sah$$

### Dana Perimbangan

Dana perimbangan berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah. (Digdowiseiso et al., 2022). Dengan demikian, formula perhitungan dana perimbangan dapat disusun sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Dana Perimbangan} \\ & = \text{Dana Bagi Hasil (DBH)} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} + \\ & \quad \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)} \end{aligned}$$

### Belanja Modal

Belanja modal ditentukan melalui penggabungan seluruh penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap (Lathifa & Haryanto, 2019). Oleh karena itu, formula perhitungan belanja modal dapat disusun sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Peralatan dan Mesin} \\ & + \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Jalan Irigasi dan Jaringan} + \text{Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

### Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah ditentukan melalui perbandingan antara total pendapatan daerah dan jumlah populasi, guna merepresentasikan kapasitas ekonomi tiap warga (Mulyani & Wibowo, 2017). Dengan demikian, formula ukuran pemerintah daerah dapat disusun sebagai berikut:

$$UPD = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

### Rasio Kemandirian

Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat (Keintjem & Murni, 2022). Sehingga Rasio Kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

### Model Regresi

Model regresi yang diterapkan dalam riset ini dirancang dan dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 BM + \beta_4 UPD + \beta_5 RK + \varepsilon$$

Keterangan:

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DP	= Dana Perimbangan
BM	= Belanja Modal
UPD	= Ukuran Pemerintah Daerah
RK	= Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
$\varepsilon$	= <i>Error</i> (residual)

Riset ini mengadopsi sebuah model ekonometrika yang dirancang untuk menguji pengaruh variabel independen serta variabel kontrol terhadap performa finansial entitas pemerintah daerah. Analisis dilakukan secara parsial untuk mengidentifikasi kontribusi unik setiap variabel, dan secara simultan untuk memahami efek gabungan mereka. Output yang diharapkan dari studi ini adalah sebuah interpretasi komprehensif mengenai determinan-determinan kinerja keuangan pada konteks pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL RISET DAN DISKUSI

### Analisis Deskriptif

Hasil uji analisis statistik deskriptif yang dilampirkan pada Tabel 1 menunjukkan variasi signifikan dalam indikator keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar Rp35,95–Rp854,94 triliun (rata-rata: Rp349,26 triliun; SD: Rp145,81 triliun), mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Dana Perimbangan (DP: DBH, DAU, DAK) bervariasi Rp13,9–Rp206,98 triliun (rata-rata: Rp127,65 triliun; SD: Rp40,57 triliun), menunjukkan kebutuhan fiskal dan prioritas pembangunan yang beragam. Belanja Modal (BM) berada di kisaran Rp7,52–Rp95,37 triliun (rata-rata: Rp29,47 triliun; SD: Rp12,87 triliun), menandakan alokasi anggaran infrastruktur yang berbeda. Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) berkisar Rp148,7–Rp832,7 juta (rata-rata: Rp255,54 juta; SD: Rp115,42 juta), menggambarkan skala operasional yang heterogen. Rasio Kemandirian Keuangan (RK) antara 0,0194–0,6259 (rata-rata: 0,2514; SD: 0,0993) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang beragam. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) berada pada 0,0103–2,0413 (rata-rata: 1,0551; SD: 0,1638), mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan yang berbeda antar daerah.

### Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Mengacu pada hasil uji normalitas menggunakan nilai skewness dan kurtosis, diperoleh bahwa nilai skewness sebesar 0.103 dengan standar error 0.184 serta nilai kurtosis sebesar -0.619 dengan standar error 0.365. Perhitungan Z-Skewness menghasilkan nilai sebesar 0.56, sementara Z-Kurtosis bernilai -1.70. Karena kedua nilai Z tersebut berada dalam rentang -1.96 hingga 1.96, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak menunjukkan deviasi yang signifikan dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas dapat dianggap terpenuhi. Dengan demikian, data residual dalam analisis ini terdistribusi normal, sehingga dapat digunakan dalam pengujian statistik yang mengasumsikan normalitas tanpa perlu dilakukan transformasi tambahan (Sugiyono, 2018).

### **Uji Multikolinearitas**

Pemeriksaan terhadap potensi multikolinearitas di antara variabel independen mengungkapkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai toleransi yang melebihi 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor kurang dari 10, yaitu PAD (0.830; 1.205), DP (0.536; 1.867), BM (0.802; 1.247), UPD (0.614; 1.628), dan RK (0.901; 1.110). Ini menandakan tidak adanya multikolinearitas, sehingga model regresi valid dan hasil estimasi dapat diandalkan.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Melalui pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen signifikan pada tingkat probabilitas 5% ( $p > 0,05$ ), yaitu PAD (0,102), DP (0,221), BM (0,667), UPD (0,375), dan RK (0,059). Ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas, sehingga varians residual konstan dan model regresi valid serta bebas bias.

### **Uji Autokorelasi**

Perhitungan uji Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,867, berada dalam rentang  $dU = 1,724$  hingga  $4-dU = 2,276$ . Ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi, sehingga residual model memenuhi asumsi independensi dalam regresi.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis terhadap pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah (Y) dilakukan melalui penerapan regresi linier berganda, yang diwakili oleh model persamaan berikut ini:

$$KKPD = \alpha + \beta_1PAD + \beta_2DP + \beta_3BM + \beta_4UPD + \beta_5RK + e$$

Di mana:

- KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan untuk pelayanan publik dan pembangunan.
- $\alpha$  (*Alpha*) = Konstanta, menunjukkan kinerja keuangan saat semua variabel independen bernilai nol.
- $\beta_1$ – $\beta_5$  = Koefisien regresi yang menunjukkan perubahan Y akibat perubahan satu satuan pada variabel independen, dengan tanda (+) untuk pengaruh positif dan (–) untuk pengaruh negatif.
- PAD = Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan daerah menggali sumber pendapatan sendiri seperti pajak dan retribusi.
- DP (Dana Perimbangan) = Dana dari pemerintah pusat untuk mendukung otonomi daerah, termasuk DBH, DAU, dan DAK.
- BM (Belanja Modal) = Pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti infrastruktur dan aset publik.
- UPD (Ukuran Pemerintah Daerah) = Mengukur skala operasional pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, atau aset.
- RK (Rasio Kemandiria) = Analisis potensi daerah dalam mendanai kegiatan operasional secara mandiri, lepas dari bantuan keuangan pemerintah pusat.
- $e$  (*Error/Residual*) = Faktor di luar model yang memengaruhi kinerja keuangan tetapi tidak dijelaskan dalam persamaan.

Hasil regresi menunjukkan konstanta 0.891, artinya jika variabel independen nol, kinerja keuangan daerah diprediksi 0.891. PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan (Sig. 0.012;  $0.003 < 0.05$ ), sedangkan Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Rasio Kemandirian tidak signifikan (Sig. 0.059, 0.161,  $0.068 > 0.05$ ). PAD dan Dana Perimbangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

### Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien R yang tercatat sebesar 0,362 menunjukkan adanya keterkaitan yang relatif lemah antara variabel independen dan kinerja keuangan daerah. Selain itu, nilai  $R^2$  yang mencapai 0,131 mengindikasikan bahwa model regresi yang diterapkan hanya mampu menguraikan 13,1% dari variasi yang terjadi dalam kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model

yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara 86,9% dipengaruhi faktor lain. Nilai Adjusted  $R^2 = 0.106$  menunjukkan model hanya menjelaskan 10,6% variasi. Nilai standar error = 0.1549136 menandakan prediksi model masih memiliki error tinggi, sedangkan nilai Durbin-Watson = 1.867 memastikan tidak ada autokorelasi.

### Uji T

Analisis uji t mengungkap bahwa tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (0,012) dan Dana Perimbangan (0,003) berada di bawah ambang batas 0,05. Ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak positif dan signifikan terhadap performa finansial pemerintah daerah. Selain itu, Belanja Modal menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan ( $p = 0,059$ ), yang mengisyaratkan bahwa efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Ukuran Pemerintah Daerah juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan ( $p = 0,161$ ), menunjukkan bahwa besarnya bukanlah faktor penentu utama. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki dampak negatif dan mendekati signifikansi pada level 10% ( $p = 0,068$ ), yang mengimplikasikan bahwa peningkatan kemandirian finansial belum tentu berkorelasi dengan peningkatan kinerja keuangan.

### Uji F

Uji F yang dilakukan menghasilkan nilai F hitung 5,107, yang secara statistik signifikan lebih tinggi dari nilai F tabel 2,21 pada tingkat signifikansi 0,000 ( $p < 0,05$ ). Ini memberikan bukti bahwa variabel independen yang diteliti (PAD, DP, BM) bersama dengan variabel kontrol (UPD, RK) memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, variasi dalam variabel-variabel tersebut dapat menjelaskan variasi yang signifikan dalam kinerja keuangan daerah. Model regresi valid untuk menjelaskan variasi kinerja, meskipun tidak semua variabel berpengaruh secara parsial. Hal tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji-t, diperoleh t-statistik sebesar 2,552 yang melampaui nilai kritis 1,65685 dengan tingkat signifikansi 0,012 ( $<0,05$ ), sehingga hipotesis nol ( $H_0$ )

dinyatakan tidak dapat diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) dinyatakan diterima. Hasil ini secara empiris membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan PAD berbanding lurus dengan perbaikan kinerja keuangan, terutama melalui peningkatan kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

Hasil ini sejalan dengan riset sebelumnya (Rahayu & Putri, 2020; Santoso & Widodo, 2018) yang menyatakan bahwa PAD yang tinggi berkorelasi dengan capaian fiskal yang optimal. PAD mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan mandiri, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, serta memungkinkan alokasi anggaran yang lebih strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai  $t$  hitung sebesar 3,028, yang didapatkan dari analisis uji- $t$ , melampaui nilai kritis  $t$  tabel yaitu 1,65685. Hal ini, bersama dengan koefisien positif dan signifikansi 0,003 (di bawah 0,05), mengarahkan pada penolakan  $H_0$  dan penerimaan  $H_2$ . Konsekuensinya, dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Riset ini menegaskan peran vital Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Transfer dana pusat ini memperkuat stabilitas fiskal, khususnya di daerah dengan kapasitas pendapatan rendah. Temuan ini sejalan dengan riset Siregar & Prasetyo (2019) serta Fitriani et al. (2017), yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan mendukung ketahanan keuangan daerah dengan melengkapi pendapatan lokal dan meminimalkan kesenjangan fiskal.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Uji  $t$  mengungkapkan nilai  $t$  hitung -1,901, melebihi nilai kritis 1,282 ( $\alpha=10\%$ ). Dengan signifikansi 0,059 (di bawah batas 0,10), hasil ini signifikan pada tingkat 10%, walau tidak pada 5%. Penelitian ini menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan mendukung hipotesis alternatif  $H_3$ . Implikasi dari temuan ini adalah bahwa terdapat hubungan terbalik antara belanja modal dan performa keuangan daerah. Dengan kata lain, ketika belanja modal meningkat, kinerja keuangan cenderung menurun, sebagaimana tercermin dalam koefisien negatif.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa peningkatan belanja modal tidak selalu memperbaiki kinerja keuangan. Faktor penyebabnya antara lain pelaksanaan proyek

yang tidak efisien atau alokasi dana yang kurang tepat. Konsistensi dengan riset Yuliani & Hidayat (2020) dan Prasetyo & Nugroho (2018) terlihat, di mana belanja modal yang tidak terkelola baik berpotensi menekan kinerja fiskal. Contohnya, kesalahan alokasi dana atau keterlambatan proyek infrastruktur dapat mengurangi keuntungan yang diharapkan, justru memperparah inefisiensi keuangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan PAD mendorong kemandirian fiskal dan Dana Perimbangan meningkatkan kapasitas pembangunan. Namun, belanja modal dan variabel kontrol rasio kemandirian keuangan berpengaruh negatif pada tingkat signifikansi 10%, mengindikasikan inefisiensi pengelolaan dana. Variabel kontrol ukuran pemerintah daerah tidak berdampak signifikan. Kelima variabel secara bersama-sama memengaruhi kinerja keuangan, dengan model analisis yang cukup menjelaskan variasi capaiannya.

### **Implikasi**

Implikasi praktis dari riset ini ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat serta pengambil kebijakan publik. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PAD dan belanja modal dengan menggali potensi pendapatan lokal secara optimal serta fokus pada proyek-proyek yang berdampak positif bagi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu mengevaluasi mekanisme alokasi dana perimbangan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan fiskal daerah. Riset ini juga menyarankan peningkatan kapasitas manajerial di tingkat daerah melalui pendampingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan untuk memastikan kemandirian fiskal diimbangi dengan efisiensi anggaran.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan yang signifikan, terutama dalam hal cakupan geografis yang terbatas pada premarital daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2023. Keterbatasan ini berimplikasi pada ketidakmampuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain di Indonesia, mengingat bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan kebijakan fiskal yang unik dan beragam. Selain itu, nilai R yang diperoleh sebesar 0,362



menunjukkan bahwa model regresi yang diterapkan hanya mampu menjelaskan sekitar 36,2% dari variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dapat dikategorikan sebagai rendah. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah variabel lain yang relevan, yang meskipun belum diintegrasikan ke dalam model analisis ini, berpotensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, disarankan agar riset mendatang tidak hanya memasukkan variabel-variabel tambahan tetapi juga memperluas cakupan wilayah kajian untuk meningkatkan akurasi serta validitas hasil analisis.

### Saran

Riset mendatang perlu memperluas periode riset guna mengumpulkan data yang lebih lengkap, sehingga sampel dapat lebih mewakili kondisi riil. Selain itu, disarankan agar para peneliti di masa mendatang memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan provinsi-provinsi lain, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan nuansial mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat bahwa dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal dapat bervariasi secara signifikan antarprovinsi, yang berpotensi memengaruhi hasil analisis secara substansial. Selain itu, integrasi variabel-variabel independen tambahan yang memiliki relevansi teoritis dan empiris terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangatlah dianjurkan, guna meningkatkan ketepatan dan robustitas model analisis yang diterapkan. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan tidak hanya dapat memperkaya khazanah literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan kebijakan publik serta praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai belahan Indonesia.

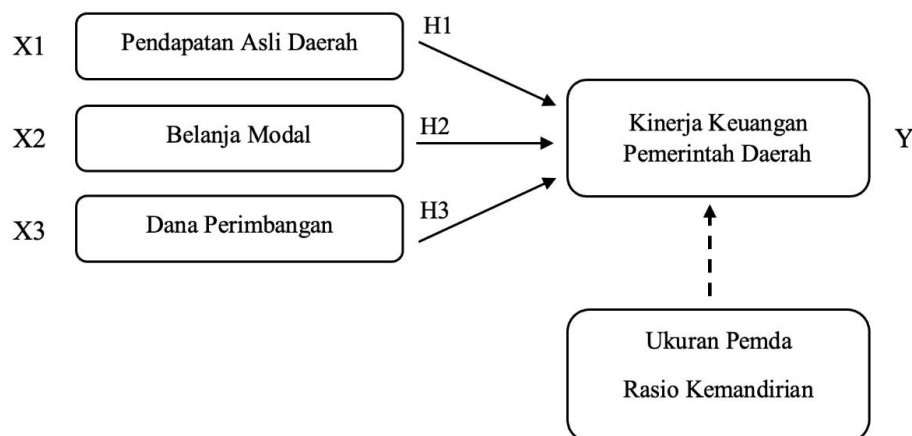
### DAFTAR PUSTAKA

- Alfia Maulina, M. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 390-399.
- Anderson, J. (2020). *Online Data Collection Methods: Accelerating Research in a Digital World*. London: Research Publishers.
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.
- Digdowiseiso, K., Nugroho, P. R., & Hermawan, A. (2022). *Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia*. Jakarta: Regional Studies Journal.

- Dumadi, H., Herlina, D., & Susanti, A. (2022). "Financial Performance Analysis in Regional Governments: A Comparative Study." *Journal of Public Budgeting*, 15(3), 123–135.
- Ekaningtiyas, F. T. (2019). The Effect of Original LG Revenue, aBalancing Fund, and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review (TIAR)*, 39-49.
- Febriyani, S., Nugroho, D., & Pramono, T. (2021). "Statistical Assumptions in Regression Models: An Application in Public Sector Research." *Journal of Quantitative Methods*, 12(2), 78–89.
- Haryanto, H. L. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-10.
- Himmati, T. D. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 51-65.
- Ika Novita Ardedia, H. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 60-78.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ismanto, A., & Pebruary, D. (2021). *Statistical Methods in Social Science Research*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johnson, M. (2022). *Research Methods in the Digital Age: Exploring the Effectiveness of Online Resources*. New York: Academic Press.
- Kuangan, D. J. (2023). *Portal Data APBD*. Retrieved from DJPK Kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=11&pemda=-->
- Khairudin, C. A. (2022). Dampak Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 291-296.
- Kumba Digdowiseiso, B. S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 2571-2580.
- Lestari, S., & Hendrawati, F. (2020). "Multicollinearity Detection in Regression Models: A Practical Approach." *Journal of Statistical Analysis*, 8(1), 45–55.
- Meirini, D. R. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 1189-1199.
- Muhammad Husni Mubarak, A. A. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 503-512.
- Murni, V. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017-2019. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 953-962.

- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Kontemporer (JRAK)*, 287-302.
- Priyatno, D. (2022). *Guidelines for Data Analysis Using SPSS*. Jakarta: Media Nusantara.
- Ratnawati, S. P. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 2068-2082.
- Saring, M. M. (2022). Factors Affecting The Financial Performance of Local Government An-tecedents in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 15-23.
- Sedana, N. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 1080-1110.
- Smith, J., & Brown, R. (2021). "The Role of Internet-Based Resources in Theoretical Development." *International Journal of Digital Research*, 18(4), 234–245.
- Sugiyono. (2022). *Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taylor, P. (2019). *Enhancing Theoretical Frameworks with Online Resources*. Oxford: Academic Resource Press.
- Taylor, P. (2020). "Data Visualization Techniques for Enhanced Research Insights." *Journal of Data Analysis*, 10(3), 67–89.
- Wibowo, S. M. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kaabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 57-66.
- Yuniarta, G., & Putri, A. P. (2023). "The Influence of Regional Original Income on Economic Development in Indonesia." *Journal of Economic Development Studies*, 25(2), 101–116
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### TABEL DAN GAMBAR



Gambar 1 Model Riset  
Sumber: Diolah Penulis

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
PAD	1755948880735600.00	854942206458160.00	49261686706646.25	005806303933043.20000	
DP	1753900643724190.00	206975969103700.00	27653109010039.92	000565090086562.82000	
BM	1757519221013100.00	95366984770188.00	29472528819476.44	502866026660635.55300	
UPD	175	148701716.00	832702139.00	255538308.7657	115420448.85461
RK	175	.0194	.6259	.251406	.0992726
KKPD	175	.0103	2.0413	1.055133	.1638008
Valid N	175				

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas dengan Nilai Skewness dan Kurtosis

Descriptive Statistics						
	N	Mean	Skewness	Kurtosis		
	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	175	.10	.103	.184	-.619	.365
Valid N (listwise)	175					

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.891	.075		11,918	.000		
	PAD	2,256E-16	.000	.201	2,552	.012	.830	1,205
	DP	1,198E-15	.000	.297	3,028	.003	.536	1,867
	BM	-1,937E-15	.000	-.152	-1,901	.059	.802	1,247
	UPD	1,830E-10	.000	.129	1,409	.161	.614	1,628
	RK	-.229	.125	-.139	-1,834	.068	.901	1,110

a. Dependent Variable: KKPD

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedasitias

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.037	.020		1.842	.067
	PAD	3.888E-017	.000	.135	1.644	.102
	DP	1.301E-016	.000	.126	1.230	.221
	BM	1.174E-016	.000	.036	.431	.667
	UPD	3.089E-011	.000	.085	.889	.375
	RK	-.063	.033	-.150	-1.902	.059

a. Dependent Variable: ABSRES

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.362 <sup>a</sup>	.131	.106	.1549136	1.867

a. Predictors: (Constant), RK, DP, PAD, BM, UPD  
b. Dependent Variable: KKPD

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	.891	.075	11.918	.000	
	PAD	2.256E-016	.000	.201	2.552	.012
	DP	1.198E-015	.000	.297	3.028	.003
	BM	-1.937E-015	.000	-.152	-1.901	.059
	UPD	1.830E-010	.000	.129	1.409	.161
	RK	-.229	.125	-.139	-1.834	.068

a. Dependent Variable: KKPD

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.362 <sup>a</sup>	.131	.106	.1549136	1.867

a. Predictors: (Constant), RK, DP, PAD, BM, UPD  
b. Dependent Variable: KKPD

Tabel 8 Hasil Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	.891	.075	11.918	.000	
	PAD	2.256E-016	.000	.201	2.552	.012
	DP	1.198E-015	.000	.297	3.028	.003
	BM	-1.937E-015	.000	-.152	-1.901	.059
	UPD	1.830E-010	.000	.129	1.409	.161
	RK	-.229	.125	-.139	-1.834	.068

a. Dependent Variable: KKPD

Tabel 9 Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.613	5	.123	5.107	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.056	169	.024		
	Total	4.669	174			

a. Dependent Variable: KKPD

b. Predictors: (Constant), RK, DP, PAD, BM, UPD